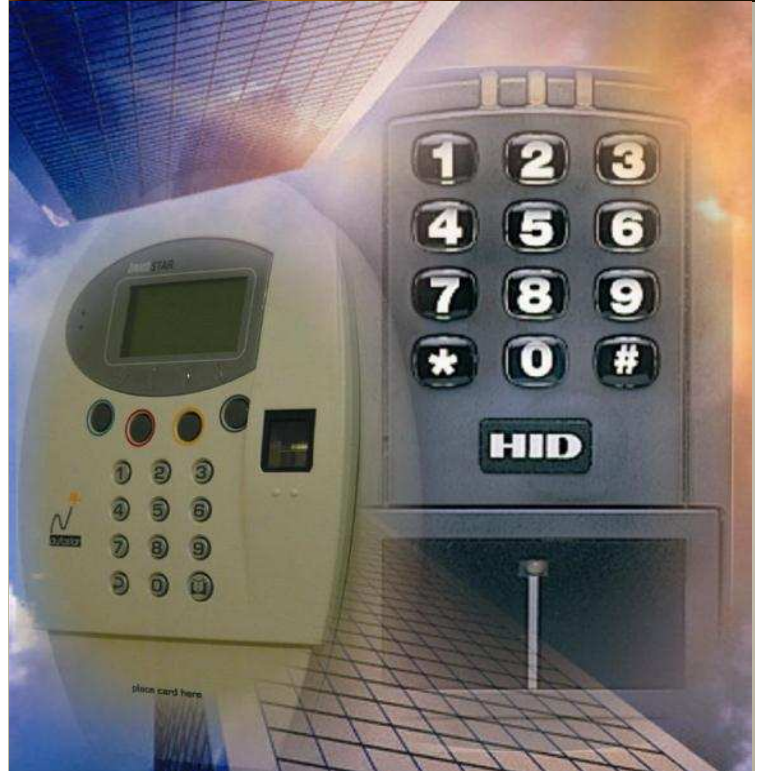


Sistem Informasi Manajemen

Perbandingan
Sistem
Informasi
Akuntansi
Komersil dan
Pemerintah



Disusun oleh:

Ahmad Yusuf 02

Risca Dessyanty 26

Yessi Puspita Wardani 29

Kelas 8-C Akuntansi Khusus

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

PENDAHULUAN

Sistem informasi akuntansi pada sektor komersil berbeda dengan pemerintah karena berbagai perbedaan proses bisnis dan karakteristik masing-masing. Di sektor komersil siklus pendapatan berkaitan erat dengan siklus belanja karena tujuannya adalah untuk menghitung laba atau rugi. Hal ini berbeda dengan sektor komersil dimana entitas pendapatan terpisah dengan entitas belanja. Fokus dari sektor pemerintah adalah pelayanan yang biayanya diambil dari alokasi anggaran belanja.

Tulisan ini akan mencoba membandingkan berbagai siklus informasi akuntansi antara sektor komersil dan pemerintah. Siklus-siklus tersebut meliputi:

1. Siklus pendapatan/revenue cycle.
2. Siklus belanja/expenditure cycle.
3. Siklus penggajian/payroll cycle.
4. Siklus buku besar dan pelaporan

Khusus untuk siklus produksi tidak kami bahas karena karakteristik produksi sudah masuk dalam siklus belanja pemerintah. Dengan mengetahui perbandingan tersebut penulis berharap dapat memahami pemerintah sebagai sebuah entitas akuntansi secara keseluruhan.

PEMBAHASAN

Perbandingan sistem akuntansi komersil dan pemerintah secara umum dapat diidentifikasi seperti berikut ini

Tabel 1 Perbedaan SIA Sektor Komersil dan Pemerintah

| Komersil | Publik/Pemerintah |
|---|--|
| Berfokus ke penghitungan laba/rugi | Berfokus untuk pelayanan yang kebanyakan didanai dari pajak |
| Dimiliki pemegang saham | Dimiliki bersama oleh konstituen |
| Kontribusi sumber daya berkaitan dengan manfaat yang akan diperoleh | Kontribusi sumber daya tidak berkaitan langsung dengan manfaat/layanan yang diperoleh. |
| Keputusan operasional bersifat fleksibel | Bersifat rigid(perlu konsensus) |
| Menggunakan Standar Akuntansi Komersial | Menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat |
| Basis pengakuan pendapatan kas/akrual | Masih menggunakan Cash Toward Acrual |
| Jenis usaha : dagang,manufaktur, jasa | Jasa/layanan |

Sumber : Robert J Freeman dalam Governmental and Nonprofit Accounting

SIKLUS PENDAPATAN (REVENUE CYCE)

Siklus pendapatan komersil dan pemerintah mempunyai karakteristik yang berbeda. Di komersil, pendapatan diperoleh dari pelanggan setelah menyerahkan barang atau jasa. Hal tersebut merupakan bentuk dari transaksional exchange yaitu ada sumber daya yang diberikan dan diterima. Di sektor pemerintah, hal tersebut juga ada tetapi hanya porsi kecil dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menurut Robert J Freeman dalam Governmental and Nonprofit Accounting, pendapatan pemerintah mungkin diperoleh dari exchange transactions maupun non-exchange transaction. Di Indonesia hal tersebut terlihat pada postur penerimaan APBN. Penerimaan di APBN terdiri dari:

1. Pajak
2. Pendapatan Negara Bukan Pajak
3. Hibah

Sumber- sumber penerimaan negara tersebut didominasi non-exchange transactions dimana pendapatan diperoleh dari pemungutan pajak sehingga tidak ada sumber daya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan pendapatan yang diperoleh.

Tabel 2. Perbedaan Siklus Pendapatan Komersil dan Pemerintah

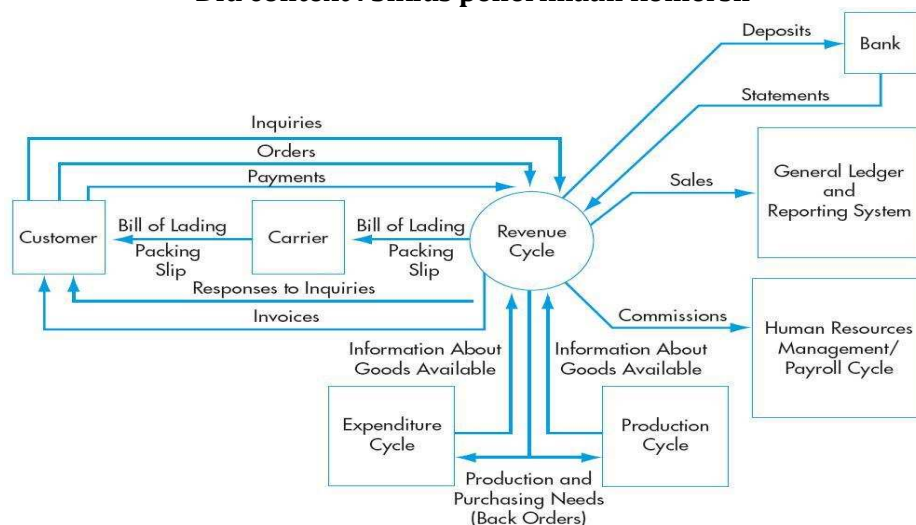
| Aspek | Komersil | Pemerintah |
|------------------|---|--|
| Tujuan | Mengidentifikasi arus sumber daya masuk | Mengidentifikasi arus sumber daya masuk |
| Sumber | Penjualan, pemberian jasa, pendapatan lain-lain | Pajak ,PNBP, hibah |
| Pihak terlibat | Perusahaan dan pelanggan | Pemerintah, bank, wajib pajak, wajib bayar, negara/organisasi donor,BUMN, investor |
| Bentuk transaksi | Exchange | Exchange dan non-exchange |

Untuk mempermudah identifikasi setiap jenis pendapatan maka kami mengidentifikasi terlebih dahulu pihak yang terkait dalam pendapatan masing-masing.

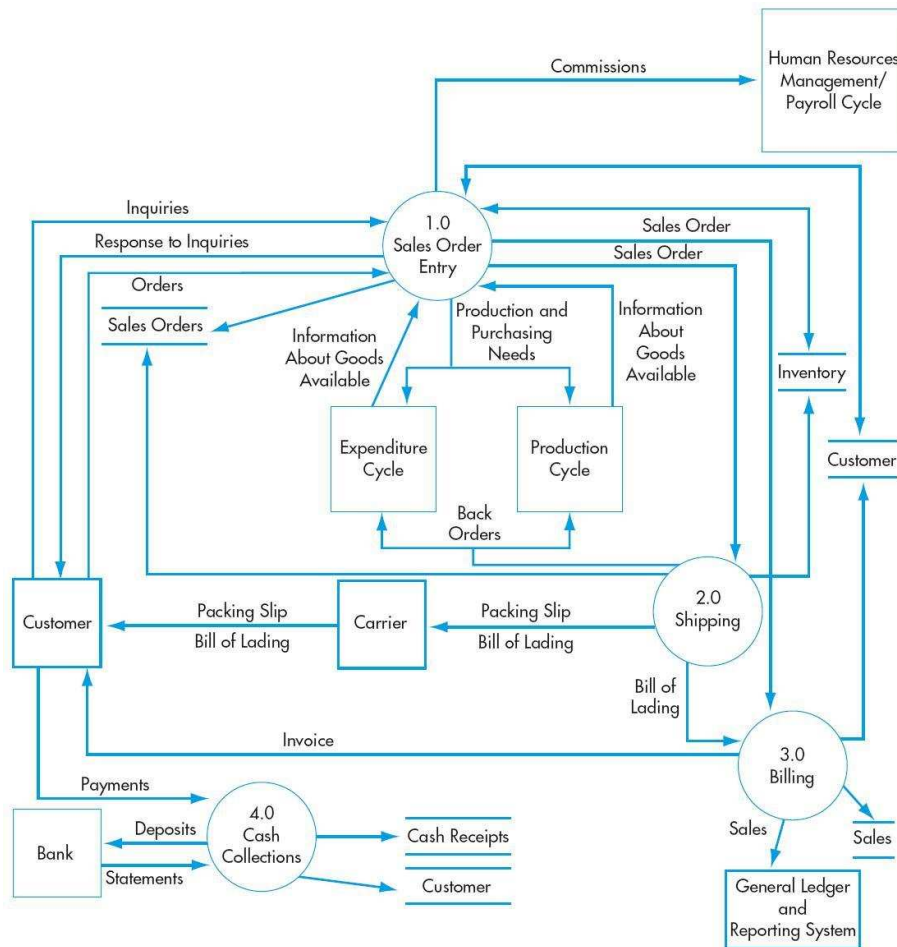
Tabel 3. Pihak Terkait Jenis Pendapatan dalam Siklus Pendapatan Pemerintah

| No | Jenis Pendapatan | Pihak Terkait |
|----|--------------------|--|
| 1. | Pajak | Pemerintah(DJP), Wajib Pajak, bank |
| 2. | PNBP | |
| | - Sumber daya alam | Pemerintah, investor,bank |
| | - Deviden | Pemerintah, BUMN,bank |
| | - BLU/PNBP lainnya | Pemerintah, pengguna layanan, bank |
| 3. | Hibah | Pemerintah, lembaga/negara donor, bank |

Dfd context : Siklus penerimaan komersil



Dfd level 0 :siklus penerimaan Komersil

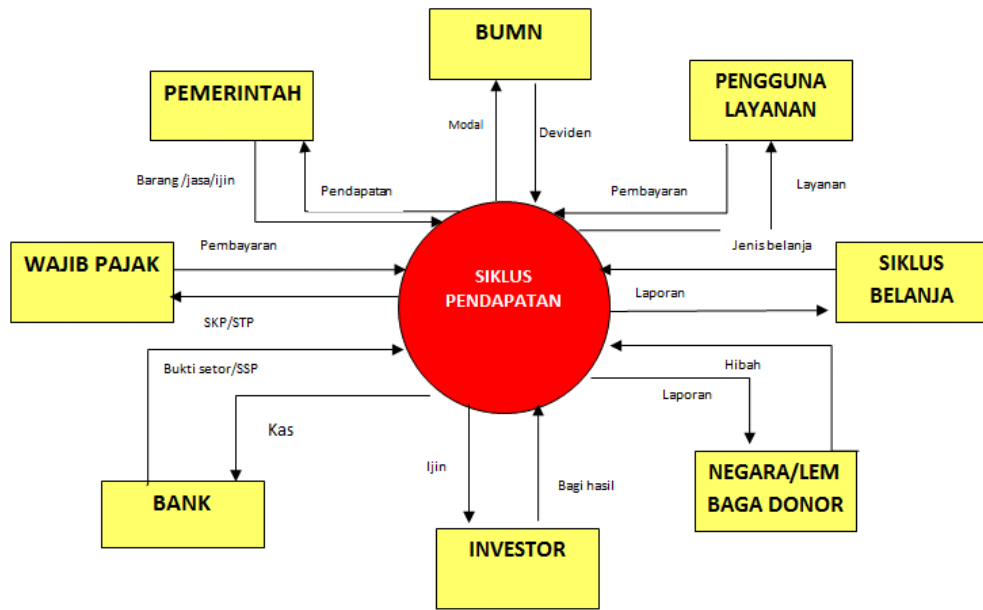


Analisa :

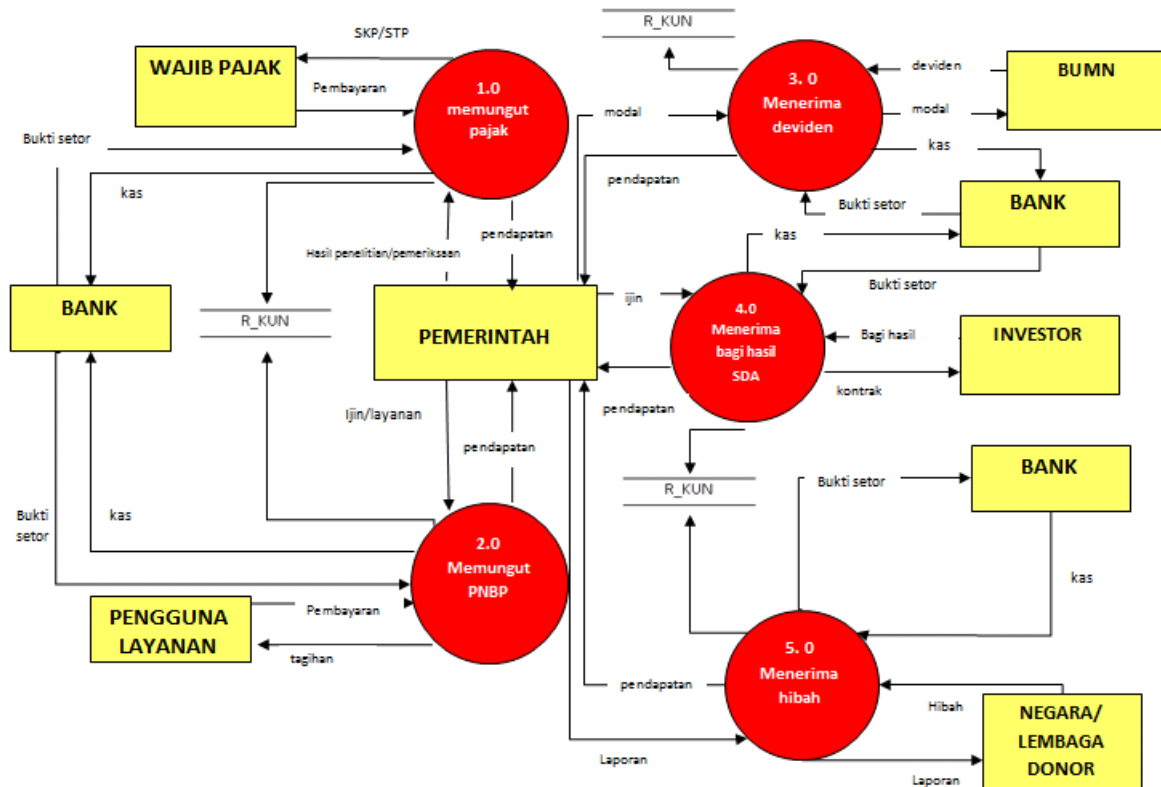
DFD menurut Romney mempunyai satu kesalahan yaitu adanya carrier yang berhubungan langsung dengan customer tanpa adanya proses. Hal ini tidak diperbolehkan dalam DFD karena harus dihubungkan dengan proses. Alternatifnya carrier ini tidak perlu dimunculkan atau ditambah dengan proses.

Proses bisnis yang digambarkan oleh Romney adalah jenis manufaktur atau dagang sedangkan di sektor privat didominasi oleh jasa/layanan. Hal ini menyebabkan perbedaan mendasar pada siklus pendapatan sektor pemerintah.

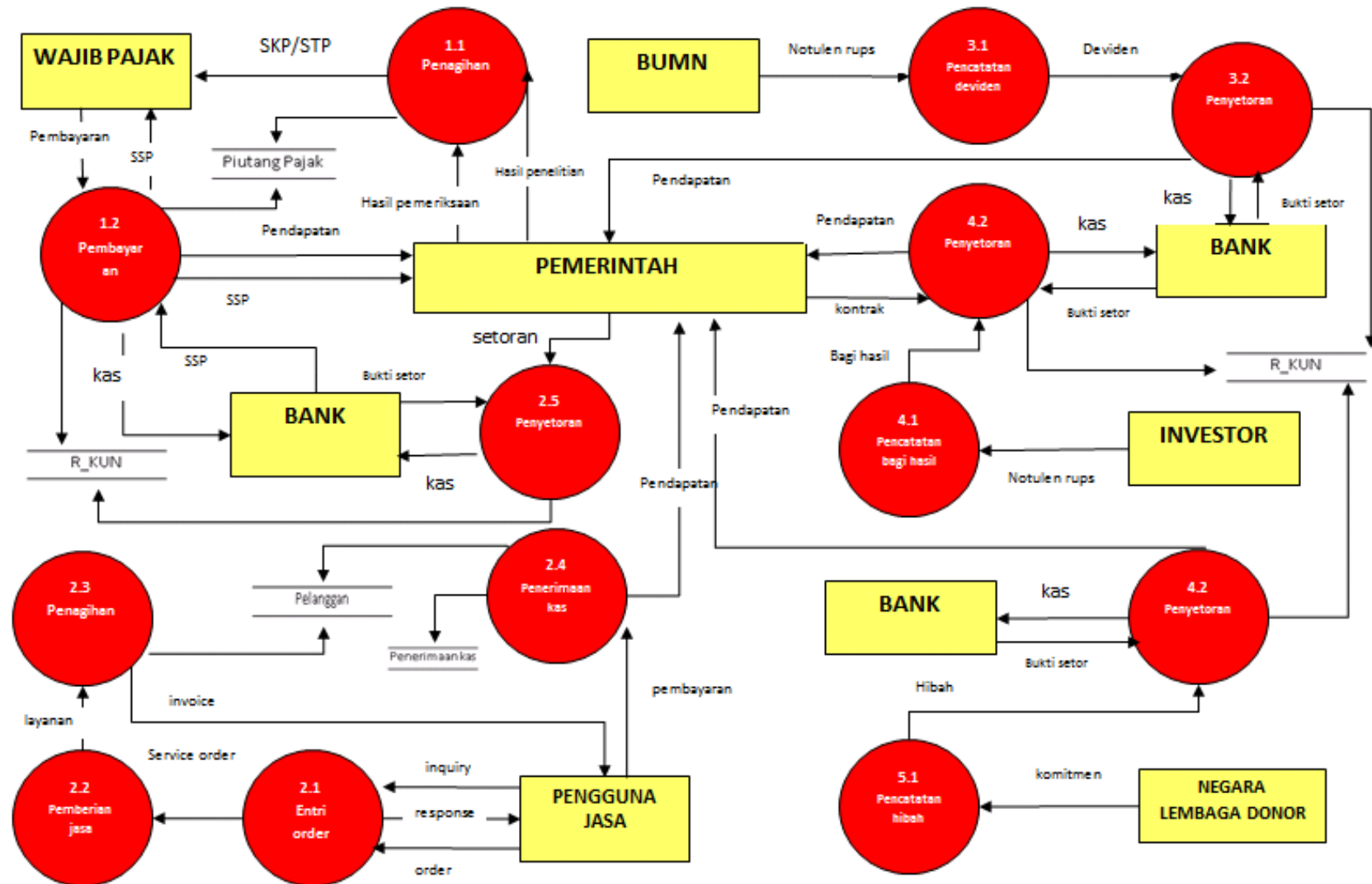
DFD Context Siklus Pendapatan Pemerintah



DFD Level 0 Siklus Pendapatan Pemerintah



DFD Level 1 Siklus Pendapatan Pemerintah



SIKLUS BELANJA/ EXPENDITURE CYCLE

Pada akuntansi keuangan komersial atau bisnis terdapat pengertian expense (beban), sedangkan pada akuntansi pemerintahan tidak menggunakan istilah expense melainkan expenditure yang secara lebih spesifik berarti pengeluaran anggaran atau belanja. Hal ini disebabkan karena sampai dengan saat ini pemerintah menggunakan pendekatan kas dalam mencatat pengeluarannya.

Pengertian pengeluaran di sini lebih luas daripada pengertian expense atau beban, yaitu selain mempunyai pengertian yang sama dengan beban dalam hal belanja operasional, juga termasuk didalamnya adalah pembayaran angsuran atau pelunasan hutang jangka panjang dan pembelian aset tetap.

Jenis-jenis belanja yang utama dilakukan oleh instansi terkait pemerintah pusat antara lain:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Contoh belanja pegawai antara lain belanja gaji dan tunjangan pegawai, pemberian uang duka bagi pegawai, dll.

Kategori belanja pegawai ini dijelaskan dalam siklus tersendiri yang lebih terperinci yaitu siklus penggajian atau payroll pegawai sehingga dapat diperbandingkan dengan siklus pegawai pada bidang komersial atau bisnis.

2. Belanja Barang

Belanja barang adalah Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Belanja barang itu sendiri terbagi menjadi belanja barang operasional dan belanja barang non- operasional, belanja barang BLU dan Belanja barang untuk masyarakat atau entitas lain.

Belanja Barang yang rutin dilakukan adalah belanja barang operasional dimana Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.

- a. Contoh dari belanja barang operasional antara lain:
- b. Belanja Keperluan Kantor
- c. Belanja pengadaan bahan makanan
- d. Belanja bahan
- e. Belanja pengiriman surat dinas
- f. Belanja langganan daya dan jasa (exp: listrik, air, telepon termasuk biaya rumah dinas)

- g. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan.
- h. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, dll.

3. Belanja Modal

Belanja modal adalah Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Jenis belanja modal yang umum dilakukan antara lain:

- a. Belanja modal tanah
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- c. Belanja modal gedung dan bangunan
- d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan
- e. Belanja modal lainnya.
- f. Belanja modal BLU

4. Belanja Bunga Utang

Belanja bunga utang adalah Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang.

5. Belanja Subsidi

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

6. Belanja Hibah

Merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang/barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN/D, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa.

7. Belanja Bantuan Sosial

Transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

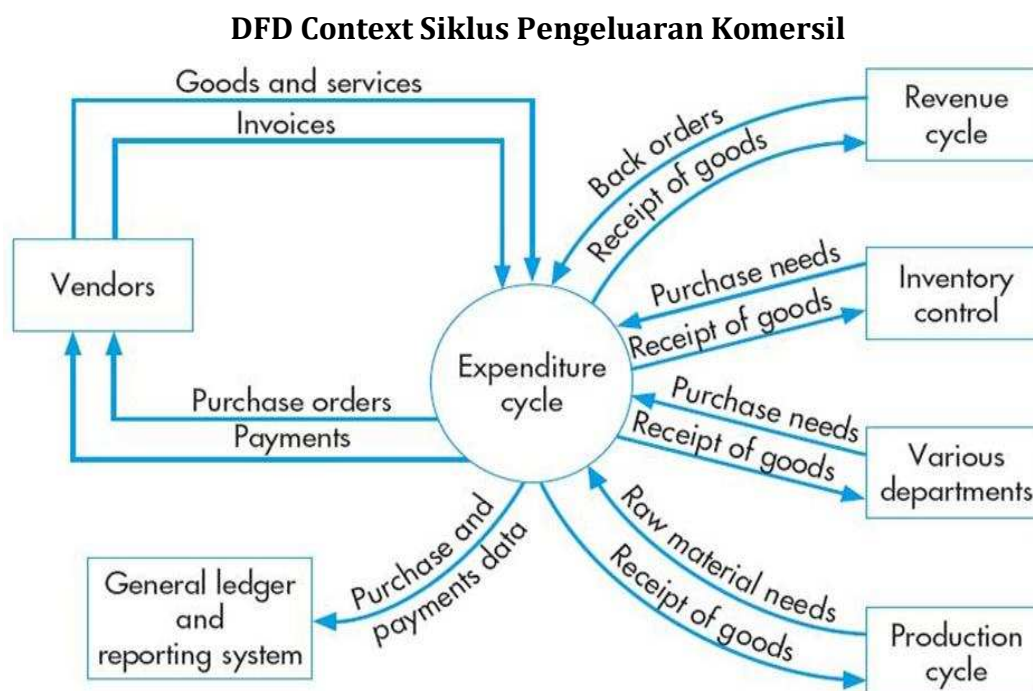
Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

8. Belanja Lain-lain

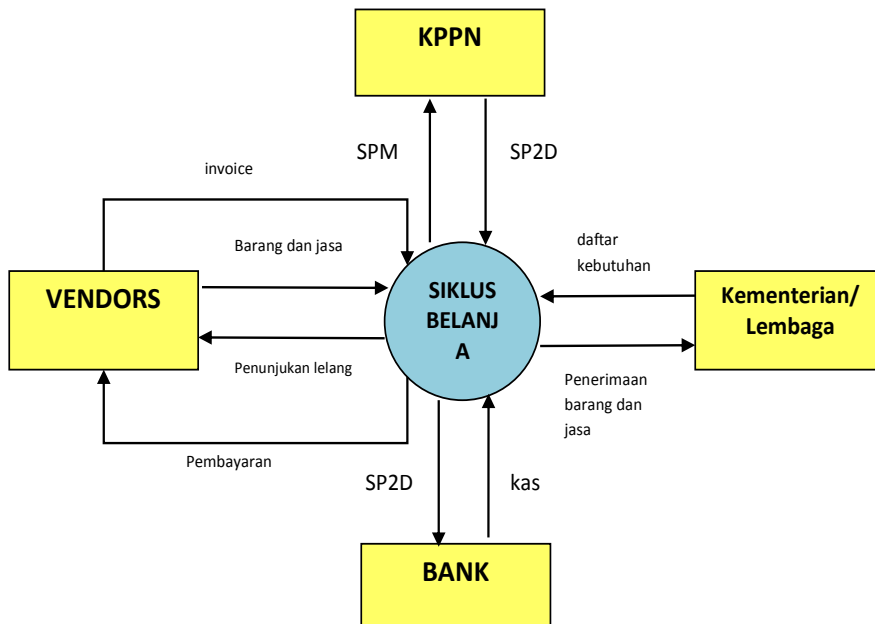
Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Perbandingan Data Flow Diagram (DFD) pada Siklus Pengeluaran (Komersial/Bisnis) dan Siklus Belanja Pemerintah

1. Context Diagram



DFD Context Siklus Pengeluaran Pemerintah



Analisis Perbandingan context diagram:

Pada Context Diagram siklus pengeluaran akuntansi komersial, pihak-pihak internal yang terkait dalam proses terjadinya pengeluaran untuk pembelian bahan baku dan pendukung kegiatan produksi dan kegiatan operasional perusahaan diantaranya adalah siklus akuntansi lain yaitu:

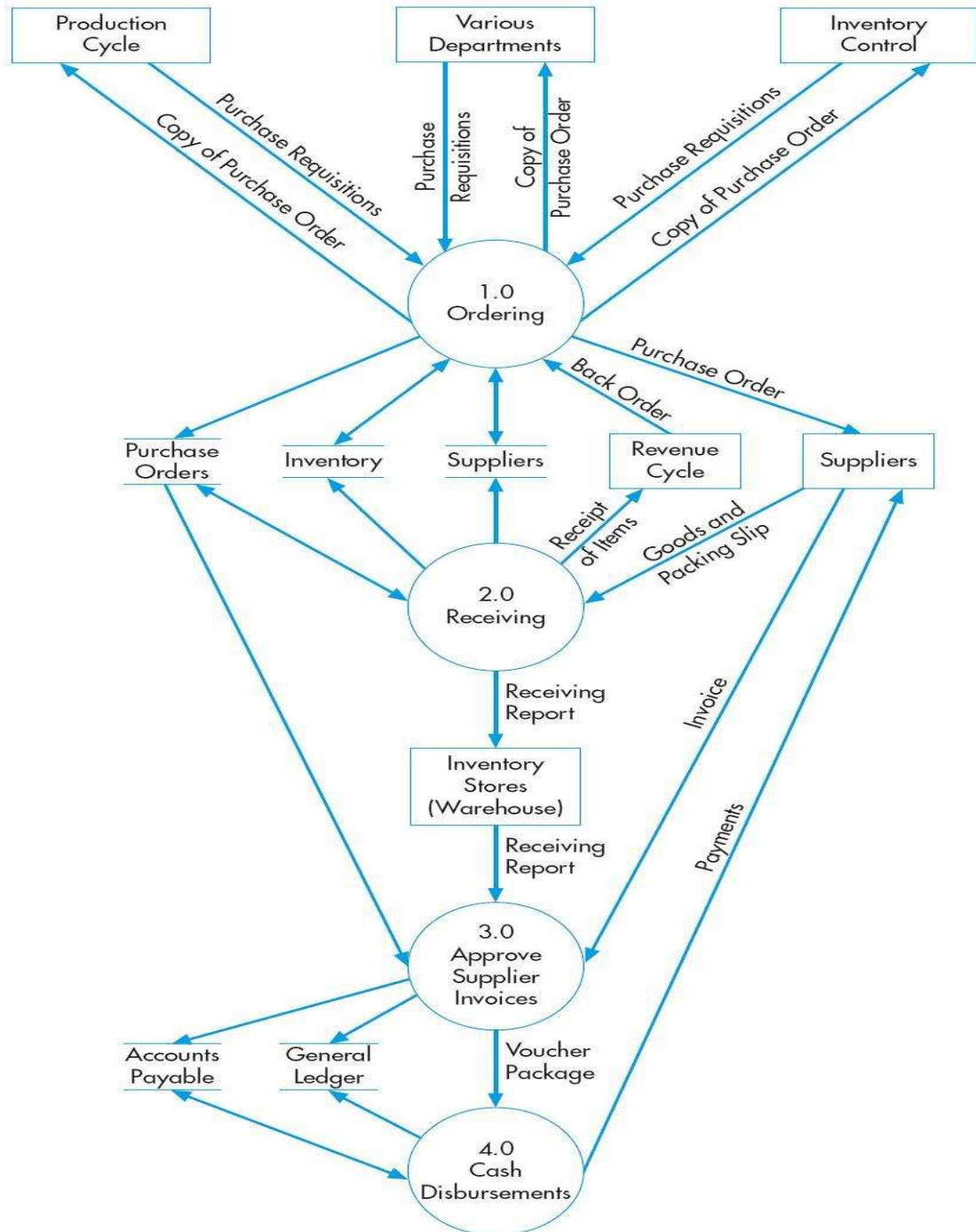
1. revenue cycle yang merupakan sumber dana atas pengeluaran,
2. Production cycle yaitu asal permintaan atas bahan baku,
3. Departemen lain dalam perusahaan yaitu asal permintaan barang lainnya.

Pada sistem akuntansi pemerintahan pusat jenis belanja yang hampir sama karakteristiknya dengan siklus pengeluaran pada akuntansi komersial/Bisnis adalah belanja barang dan belanja modal sedangkan belanja pegawai dijelaskan secara lebih spesifik pada siklus penggajian/payroll. Jenis belanja pemerintah lainnya tidak bersifat rutin dan jarang dilakukan pada siklus pengeluaran komersial/bisnis.

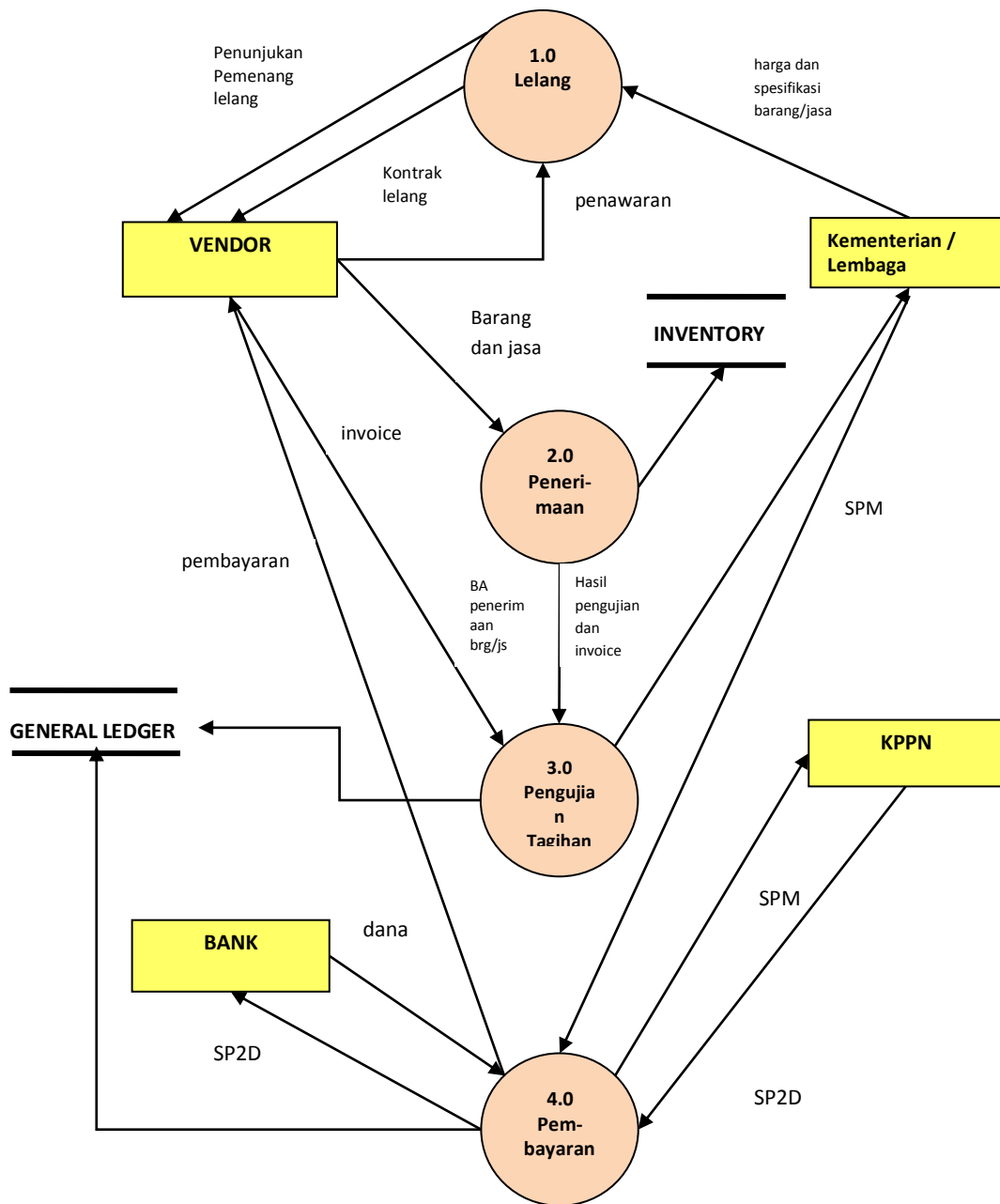
Proses belanja barang dan modal pemerintah memiliki keunikan tersendiri yaitu adanya proses lelang atas proyek pengadaan barang dan jasa tersebut yang dapat kita analogikan dengan proses pemesanan barang pada siklus pengeluaran komersial. Proses lelang dalam pengadaan barang dan jasa diatur secara tegas dalam peraturan menteri keuangan dan dilakukan pengawasan yang sangat ketat atas pelaksanaan lelang barang dan jasa oleh instansi atau kementerian/lembaga.

Pengeluaran kas atas belanja dari kas negara dilakukan oleh KPPN dimana prosesnya secara lebih jelas diatur dalam PMK yang berkekuatan hukum tetap dalam bentuk SOP yang secara mutlak harus dilaksanakan. Proses pembayaran dilakukan melalui bank sehingga entitas lain selain bank tidak terkait langsung dengan dana kas yang dikeluarkan.

Page 12



DFD Level 0 Siklus Pengeluaran Pemerintah



Alur DFD level 0 pada siklus belanja pemerintah pusat:

1. Kementerian/lembaga mengidentifikasi kebutuhan atas barang/jasa kemudian menentukan harga dan spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan.
2. Dilakukan proses lelang secara terbuka (saat ini dilakukan secara elektronik), dengan menerima penawaran dari para vendor.
3. Setelah proses lelang selesai dan pemenang lelang ditentukan vendor terpilih akan menerima penunjukan pemenang lelang dan setelah dilakukan review, kontrak lelang ditandatangani dan diserahkan kepada vendor.

4. Vendor menyerahkan barang/jasa, atas barang dan jasa yang diterima dibuat BA penerimaan barang dan jasa.
5. Barang dan jasa diterima kementerian/lembaga dan up-date dilakukan kepada data base inventory.
6. Berita Acara penerimaan barang dan jasa kemudian di uji kesesuaiannya dengan invoice dari vendor dalam proses pengujian tagihan. Invoice dalam pengujian tagihan akan meng up-date general ledger.
7. Setelah hasil pengujian tagihan dinyatakan sesuai, kementerian/lembaga menerbitkan SPM (surat perintah membayar) untuk melakukan proses pembayaran.
8. SPM diproses oleh KPPN kemudian KPPN menerbitkan SP2D (Surat perintah pencairan dana).
9. SP2D diserahkan kepada Bank untuk dilakukan proses pengeluaran kas dari Kas negara.
10. Setelah dana tersedia pembayaran dilakukan langsung oleh bank ke rekening vendor terkait.

Evaluasi:

Siklus belanja barang/jasa dan modal pada pemerintah pusat sudah cukup spesifik serta memiliki SOP dan tahapan yang jelas. Proses pengeluaran dana dari rekening kas negara sudah memiliki proses control yang baik untuk menghindari terjadinya penggelapan pengeluaran kas negara. pengecekan dokumen resmi pun sudah dilakukan dalam proses pengujian tagihan untuk dapat memastikan belanja yang dilakukan telah sesuai baik dari pihak vendor dan pihak kementerian/lembaga. Namun dalam pelaksanaannya belanja pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa memerlukan waktu yang lama karena SOP nya yang berbelit-belit dan rigid. Kementerian/lembaga diperbolehkan untuk melakukan pengadaan barang/jasa melalui penunjukan langsung namun untuk pengadaan dengan nilai dibawah Rp. 200 juta tanpa melihat dari sisi urgensi atas barang/jasa tersebut.

Perbedaan:

Pada siklus pengeluaran komersial/bisnis tidak diwajibkan dilakukan proses lelang atas pengadaan barang dan jasa. Perusahaan diperbolehkan untuk menunjuk secara langsung pihak penyedia barang dan jasa. Dalam proses pembayaran pun perusahaan dapat membayar secara langsung tanpa melibatkan Bank sedangkan pada pemerintah, pembayaran dilakukan dengan proses SPM dan SP2D melalui KPPN dan Bank dimana pembayaran dilakukan oleh Bank dari kas negara ke rekening dari vendor. Kementerian/lembaga tidak dapat melakukan pembayaran secara langsung.

SIKLUS PENGGAJIAN

Alur Siklus Penggajian

1. BKN sebagai pusat data kepegawaian menyampaikan setiap perubahan data kepegawaian yang akan mempengaruhi siklus penggajian, seperti kenaikan pangkat, jabatan, dan golongan.
2. Kementerian/Lembaga yang bersangkutan memberikan rekap presensi pegawai untuk menentukan besaran tunjangan yang akan diterima pegawai.
3. Rekap presensi dan perubahan data kepegawaian tersebut kemudian diolah di masing-masing kementerian/lembaga untuk dapat dihitung dan disusun menjadi daftar gaji dan tunjangan.
4. Kementerian/Lembaga menghitung potongan-potongan atas gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan tariff yang ditentukan oleh pihak ketiga seperti BPJS dan Taspen.
5. Kementerian/Lembaga memotong PPh pasal 21 atas gaji dan tunjangan tersebut sesuai tariff yang ditetapkan oleh DJP kemudian menyetor PPh 21 tersebut dan melaporkan SSPnya ke DJP.
6. Daftar gaji dan tunjangan tersebut setelah dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh masing-masing instansi, diserahkan kepada KPPN
7. KPPN mencetak SP2D atas gaji dan tunjangan
8. Daftar gaji diserahkan ke masing-masing bank di mana rekening bendahara instansi terdaftar
9. Bank mencairkan gaji dan tunjangan langsung ke rekening masing-masing pegawai.
10. Pegawai mendapatkan daftar gaji serta potongan dan bukti potong dari kementerian/lembaga.

Evaluasi atas Siklus Penggajian Pemerintah

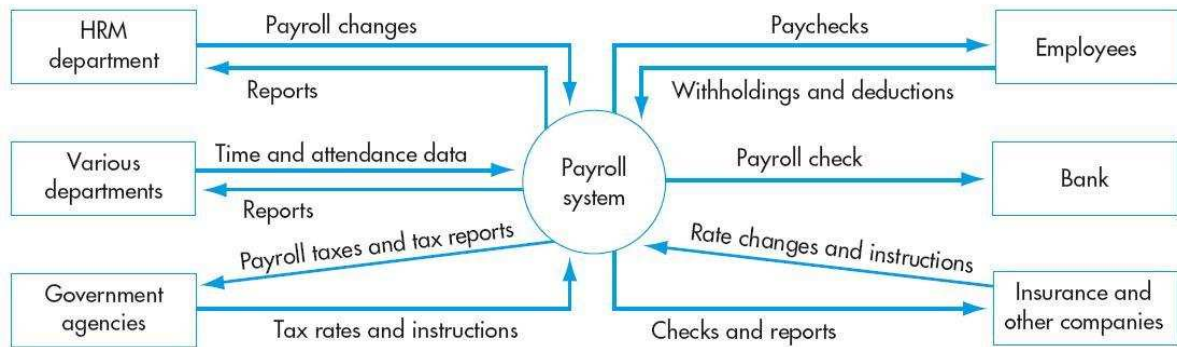
BKN yang berperan sebagai penyedia data kepegawaian seharusnya bisa benar-benar dioptimalkan. Kenyataannya hingga saat ini, BKN masih sangat manual dan belum terkomputerisasi sehingga perannya banyak diambil alih oleh sistem informasi kepegawaian masing-masing kementerian/lembaga. Hal ini sebenarnya menimbulkan *data redundancy* di mana data disimpan di BKN dan juga di masing-masing Kementerian/Lembaga. Seharusnya peran BKN dapat benar-benar dioptimalkan dengan cara modernisasi di tubuh BKN, terutama dalam proses bisnisnya.

Perbedaan antara Siklus Penggajian Komersial dengan Siklus Penggajian Pemerintah

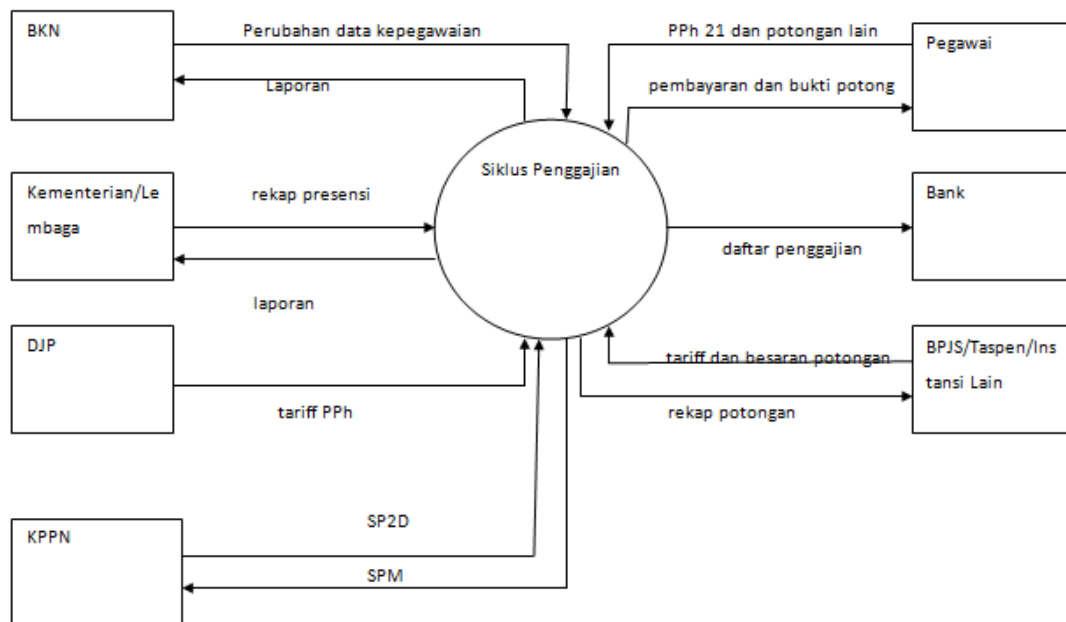
Secara umum, tidak terdapat banyak perbedaan antara siklus penggajian komersial dengan siklus penggajian pemerintah. Perbedaan terbesar terdapat pada proses perhitungan gaji dan tunjangan yang dilakukan di masing-masing kementerian/lembaga, namun untuk otorisasi

pembayaran gaji dan tunjangan terletak pada KPPN. Pada siklus penggajian komersial, perhitungan dan otorisasi gaji terletak di bagian keuangan, meskipun pada personel yang berbeda.

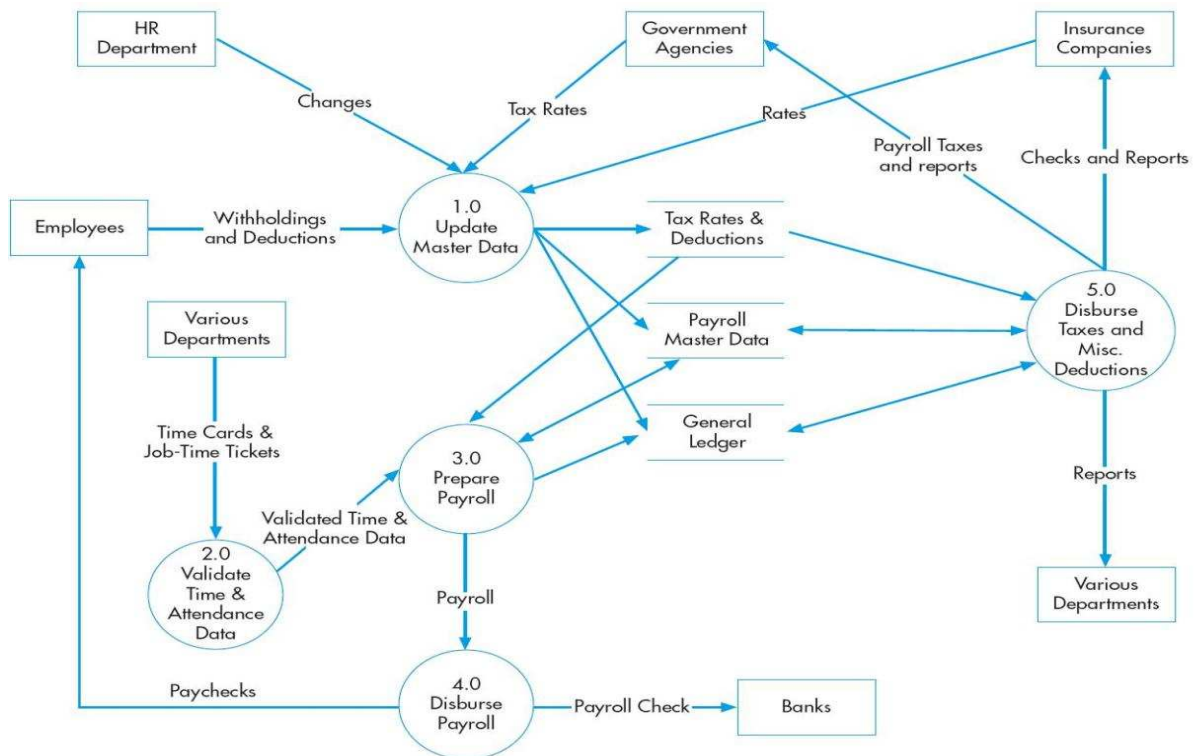
DFD Context : Siklus penggajian Komersil



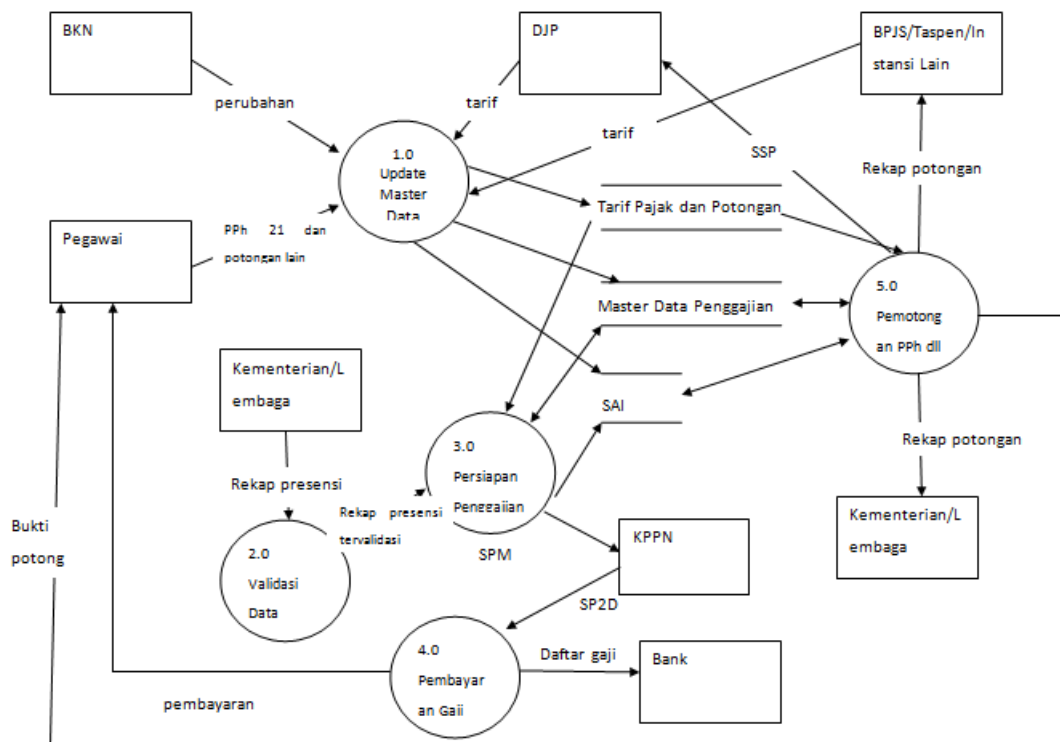
DFD Context : Siklus penggajian Pemerintah



DFD Level 0 : Siklus penggajian Komersil



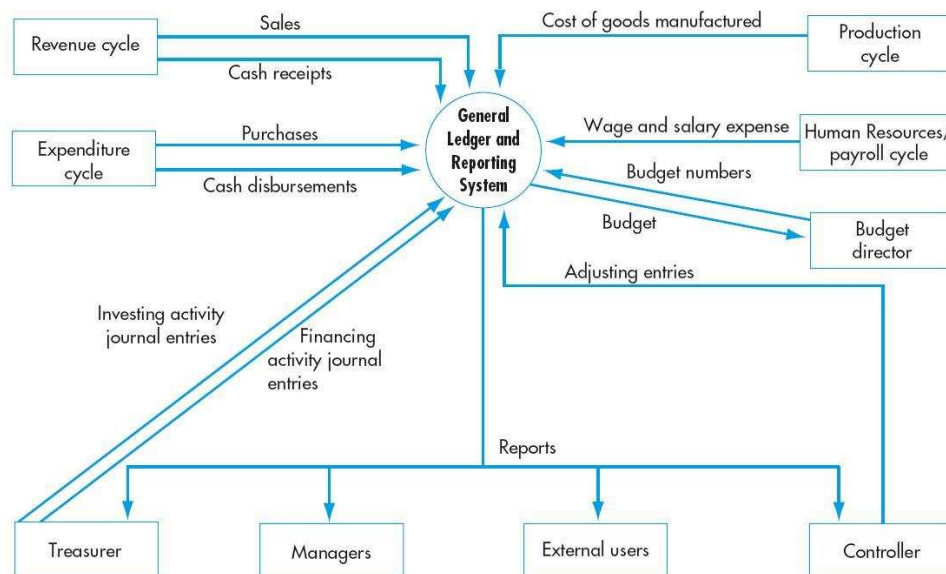
DFD Level 0 : Siklus penggajian Pemerintah



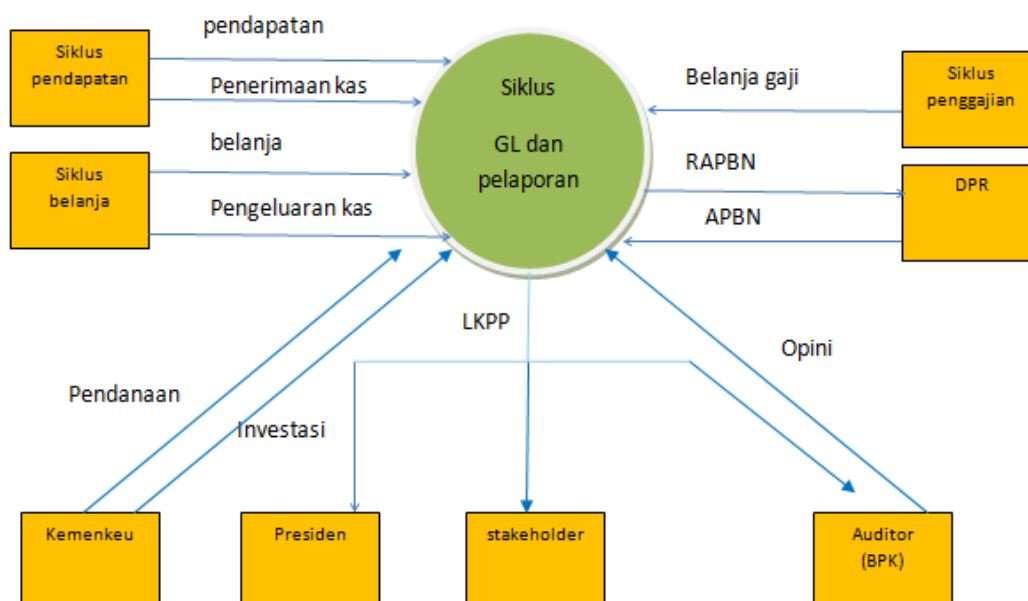
SIKLUS GENERAL LEDGER

Perbedaan mendasar dari siklus general ledger komersil dan pemerintah adalah tidak adanya siklus produksi secara khusus di pemerintah karena termasuk dalam siklus belanja. Selain hal tersebut secara garis besar sama siklusnya. Yang berbeda mungkin hanya nama nama pihak yang terlibat saja.

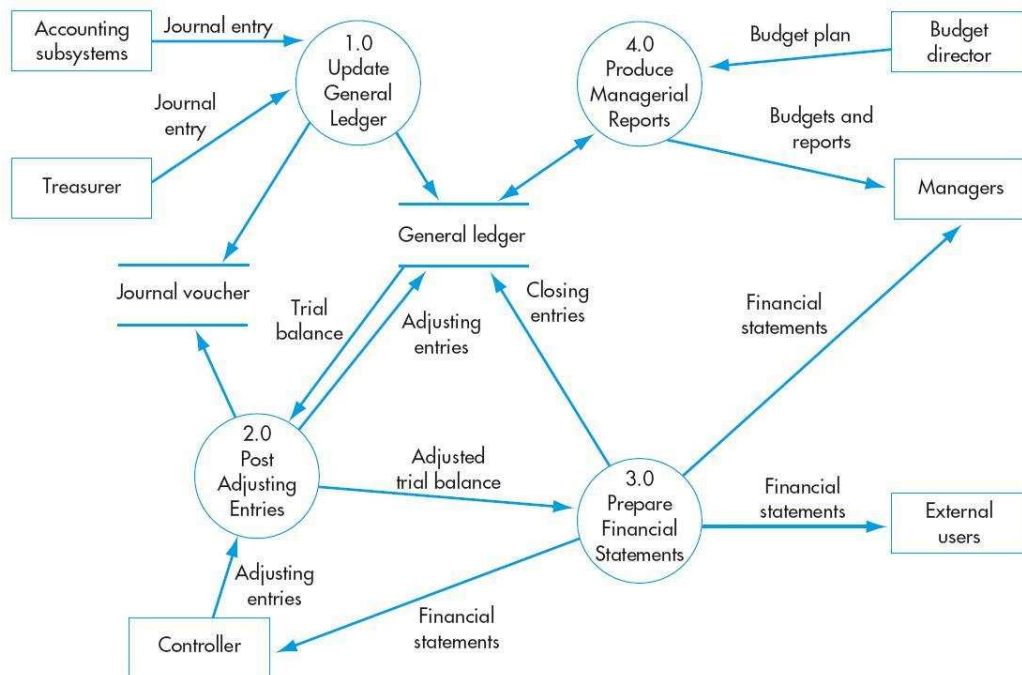
DFD Context : Siklus General Ledger dan Pelaporan Komersil



DFD Context : Siklus General Ledger dan Pelaporan Pemerintah



DFD Level 0 : Siklus GL dan Pelaporan Komersil



DFD Level 0 : Siklus GL dan Pelaporan Pemerintah

